



**ALTERNATIF PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN
PELANGGARAN HAM YANG BERAT MASA LALU
(STUDI KASUS PERISTIWA 1965-1966)**

TESIS

AHMAD NURKHOLIS

1620622063

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Ahmad Nurkholis

NRP : 1620622063

Tanggal : 12 Desember 2021

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 12 Desember 2020

Yang Menyatakan



Ahmad Nurkholis

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Nurkholis
NPM : 1620622063
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta hak bebas royalti non-eksklusif (*non-exclusive royalty fee rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ALTERNATIF PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU (STUDI KASUS
PERISTIWA 1965 - 1966)

Dengan hak bebas royalti ini Universitas Pembangunan "Veteran" Jakarta berhak untuk menyimpan, mengalihmedia, dan mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Desember 2020

nyatakan,




AHMAD NURKHOLIS

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

Nama : Ahmad Nurkholis
NRP : 1620622063
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Alternatif Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak
Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Studi Kasus
peristiwa 1965 - 1966)

Telah berhasil dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian pernyataan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta



Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.

Ketua Penguji



Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.

Penguji I



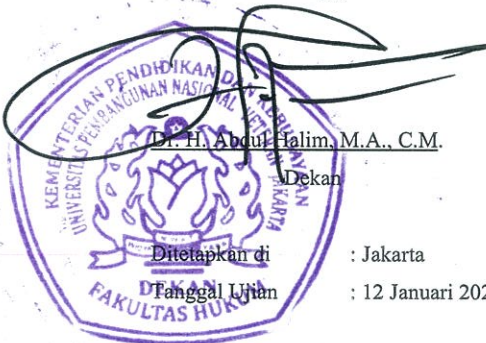
Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

Penguji II



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M

Kaprosdi



Dr. H. Abdul Halim, M.A., C.M.

Dekan

Ditetapkan di
Tanggal Lahan

: Jakarta

: 12 Januari 2021

ABSTRAK

Hak-hak korban pelanggaran HAM adalah tanggung jawab negara yang dijamin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya korban pelanggaran HAM yang berat tidak bisa menikmati hak-haknya karena berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat dan alternatif mekanisme pemenuhannya.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif empiris. Berdasarkan pembahasan diketahui bahwa hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat sudah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam tingkat peraturan pelaksana diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Penelitian menyimpulkan perlindungan korban pelanggaran HAM berat meliputi pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan (medis, rehabilitasi, psikologi, dan psikososial), dan ganti rugi materil. Dalam pelaksanaannya ditemukan kendala karena adanya ketentuan bahwa untuk mendapat status korban pelanggaran HAM yang berat harus menunggu putusan pengadilan, permohonan perlindungan sendiri membutuhkan waktu yang lama dan proses yang tidak mudah, serta belum menjadi agenda prioritas pemerintah.

ABSTRACT

The rights of victims of human rights violations are the responsibility of the state which is guaranteed in a number of laws and regulations. However, in practice victims of gross human rights violations cannot enjoy their rights due to various obstacles. This study aims to describe the obstacles in fulfilling the rights of victims of gross human rights violations and alternative mechanisms for fulfilling them.

The research was conducted using empirical normative methods. Based on the discussion, it is known that the rights of victims of gross human rights violations have been regulated in several laws, namely Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims which have been amended by Law Number 31 of 2014. At the level of implementing regulations it is regulated through Government Regulation Number 2 of 2002 concerning Procedures for Protection of Victims and Witnesses in Serious Human Rights Violations, and Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Providing Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims. .

The study concluded that the protection of victims of gross human rights violations includes the provision of compensation, restitution and assistance (medical, rehabilitation, psychological, and psychosocial), and material compensation. In its implementation, obstacles were found due to the provision that to obtain the status of a victim of serious human rights violations one must wait for a court decision, application for protection itself takes a long time and is a difficult process, and has not yet become the government's priority agenda.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas barokah pertolongan, ampunan dan perlindunganNYA dari bahaya dan buruknya amal perbuatan kita. Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas Kasih Sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang merupakan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ).

Sebagai salah seorang pegawai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang setiap hari menerima pengaduan dari korban pelanggaran hak asasi manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965-1966. Penderitaan yang dialami oleh korban peristiwa ini dalam menunggu keadilan pada masa tua mereka menginspirasi penulis untuk membuat tesis yang berjudul “ALTERNATIF PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU (STUDI KASUS PERISTIWA 1965-1966). Seperti yang diketahui, hasil penyelidikan Komnas HAM atas Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966 sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Para korban yang memasuki usia senja, bahkan ada sebagian besar yang sudah meninggal. Mereka menjadi semakin tidak menentu nasibnya dalam menunggu keadilan karena telah berulang kali berkas penyelidikan Komnas HAM dikembalikan oleh penyidik yaitu Kejaksaan Agung. Kepedulian besar penulis terhadap para korban ini yang mengilhami penulis membuat tesis ini.

Proses penyusunan tesis ini sempat terhenti selama hampir dua tahun dikarenakan kesibukan penulis sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Persuratan (Subbag TU Persuratan) Komnas HAM. Namun berkat motivasi istri tercinta, Reska Saumi, sahabat-sahabat kantor yang telah menjadi saudara, yaitu Agus Salim, Pak de Sunaryo, serta sahabat-sahabat lainnya di Subbagian TU Persuratan, maka penulis dapat segera menyelesaikan tesis ini. Mereka hampir setiap hari menanyakan kabar dan perkembangan tesis ini, sehingga penulis menjadi malu sendiri karena tesis yang tidak kunjung selesai. Selain itu penulis

ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat terdekat lainnya serta para pembimbing atas nasehat dan sarannya yang menekankan kembali perlunya semangat, ketekunan, kesabaran dan percaya diri, penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tesis ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Ibu Dr. Erna Hernawati, AK, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Ibu Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Jurusan Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, dan Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH, selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat memperdalam pengetahuan di Kampus tercinta ini.

Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I. Beliau dengan kepakaran yang melekat telah meluangkan waktu dalam memberikan motivasi dan kontribusi pemikirannya yang cemerlang bagi terselesaikannya tesis ini. Penulis benar-benar merasakan bahwa beliau telah membuka cakrawala/pandangan, mendorong munculnya gagasan, ide-ide pembaharuan dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu sekali lagi penulis menghaturkan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih dengan iringan doa “semoga amal baik beliau diterima dan mendapat balasan dari Allah Yang Maha Kasih, Maha Sayang dan Maha Pemurah”.

Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Atas bimbingan dan arahan yang beliau berikan, tesis ini dapat terselesaikan dan menjadi lebih berbobot.

Bapak Mochammad Choirul Anam, Komisioner Komnas HAM yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kursus privat yang setara dengan kuliah 3

SKS untuk menerangkan tentang korban pelanggaran HAM yang berat, kebijakan negara yang menghasilkan pelanggaran HAM yang berat, konsep kejahatan dan tanggung jawab negara, sekaligus sumber data primer bagi penulis dalam memberikan alternatif-alternatif yang bisa dilakukan oleh negara dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Gagasan-gagasan yang beliau sampaikan sungguh sangat luar biasa dan membuka cakrawala dan wawasan baru bagi penulis.

Bapak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Amiruddin, Wakil Ketua Eksternal atas motivasi dan dukungan semangatnya serta waktu yang diberikan untuk wawancara yang senantiasa untuk terselesaikannya tesis ini.

Prof Enny Soeprpto, Mas Sriyana, Bapak Bedjo Untung, Zainal Abidin, dan Nurrahman Aji Utomo yang dengan keilmuwan dan pemahamannya yang mendalam tentang pelanggaran HAM berat telah bersedia memberikan masukan yang melengkapi, membaca dan melakukan review atas tesis ini.

Bapak Dr. Tasdiyanto S.P., M.Si., Sekretaris Jenderal Komnas HAM serta Bapak Dr. Henry Silka Innah., S.Hut., M.T., Kepala Biro Umum Komnas HAM yang telah memberikan izin dan dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi Program Studi Magister Hukum.

Teristimewa dan lebih khusus kepada Bapak dan Ibu serta mertua yang penulis hormati dan sayangi, serta istri tercinta yang penulis kasihi sepenuh hati, Reska Saumi. Istri tercinta penulis inilah yang tidak pernah terlupa menyiapkan sarapan pagi sebagai bekal semangat bagi penulis dalam menjalani hari-hari. Terima kasih dan sayang tidak terbatas juga penulis berikan kepada anak-anak penulis yang terkasih Fathimah putri kecil penulis yang dengan *Cornelia de Lange Syndrome* (CdLS) yang dideritanya selalu memberikan senyum istimewanya yang tidak pernah terlupakan; Muhammad, Taqiya Ahmad, dan Saqina Ahmad, jagoan penulis yang selalu dengan kemandirian mereka telah menjadi dorongan semangat yang besar bagi penulis. Karakter, keceriaan, kelucuan yang melekat pada masing-masing anak-anak penulis telah menjadi turbo yang mendorong penulis secepatnya menyelesaikan penyusunan tesis ini. Yang paling penting dan berharga melalui keluarga inilah (istri dan anak-anak tercinta dan tersayang) penulis terus belajar dan mendapat pelajaran khususnya

pemaknaan kekuatan kata syukur, sabar dan ikhlas. Melalui keluarga inilah penulis mendapatkan dasar pijakan pembelajaran dan pentingnya terus peran dan fungsi institusi keluarga, yang akhir-akhir ini dikenal dengan istilah *Home Schooling*, sebagai rasa syukur dalam kesempatan ini penulis panjatkan doa: “*Robbi auzi 'ni an asykuro ni 'matakallatii an 'amta 'alaiya wa 'alaa waalidaiya wa an 'akmala shoolikhan tardhoohu wa ashlikhlii fii dzurriyyatii ini tubtu ilaika wa innii minalmuslimiina*” (Ya Tuhanku, tunjukilah/ilhamilah hamba untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang sholeh yang Engkau ridhoi, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberikan kebaikan) kepada anak cucuku, sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri).

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan tugas akhir yang berupa tesis masih banyak kekurangan, mohon perkenan dimaafkan yang setulusnya, khususnya bagi Bapak dan Ibu Korban Peristiwa 1965-1966. Laksana setetes air yang jatuh dalam luasnya samudra, besar harapan penulis semoga tesis ini dapat sedikit memberikan manfaat bagi alternatif penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966. Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses penulisan dan penelitian berikutnya.

Jakarta, 26 Desember 2020

Ahmad Nurkholis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISIONALITAS	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	12
1.3. Ruang Lingkup Penulisan.....	12
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.5. KerangkaTeori dan Konseptual	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
II.1 Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat	26
II.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pengadilan HAM	46
II.3 Pemenuhan Hak-Hak Korban	71
II.4 Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat	76
II.5 Mekanisme Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat oleh LPSK	78
II.6 Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat	80
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	93
III.1 Jenis Penelitian	93
III.2 Pendekatan Penelitian	94
III.3 Sumber Data	96
III.4 Metode Pengumpulan Data	99
III.5 Metode Analisis Data	100
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	103
IV.1 Analisa Instrumen Hukum HAM Internasional terkait Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat	105
IV.2 Analisis Peraturan Perundang-Undangan Nasional terkait Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat	109
IV.3 Pendapat Ahli	129
IV.4. Pendapat Mahkamah Konstitusi	131
IV.5 Mekanisme Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu	134
IV.6 Peran LPSK dalam Pemenuhan Pemenuhan Hak-Hak Korban.....	142
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	157
V.1 KESIMPULAN	157
V.2 SARAN.....	158

DAFTAR PUSTAKA	160
RIWAYAT HIDUP	